

3



Drs. H. M. Jusuf Kalla

H. Wiranto SH.

**PASANGAN M. JUSUF KALLA-WIRANTO
(NOMOR URUT: 3)**

A. CALON PRESIDEN

Nama Lengkap : M. Jusuf Kalla
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone-Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Nama Istri : Ny. Mufidah Jusuf
Jumlah Anak : Lima orang
Pekerjaan : Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009)

Riwayat Pendidikan :
Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 1967

Pengalaman Organisasi :
a. Mahasiswa
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNHAS Tahun 1964-1966
Ketua Umum HMI Cabang Makassar Tahun 1965-1966
Ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulsel Tahun 1966-1968
b. Profesi
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel Tahun 1985-1997
Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Tahun 1997-2002
Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sulsel Tahun 1985-1995
Wakil Ketua ISEI Pusat Tahun 1987-2000
Penasehat ISEI (2000-sekarang)
Ketua Umum Ikatan Alumni UNHAS Makassar Tahun 1990-sekarang



c. Sosial/Pendidikan

| | |
|---|---------------------|
| Ketua Yayasan Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Tahun 1975-1995 |
| Ketua Perguruan Islam Datumuseng Makassar | Tahun 1975-sekarang |
| Anggota Dewan Penyantun UNHAS, IAIN, IKIP Makassar | Tahun 1980-sekarang |
| Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hadji Kalla | Tahun 1982-sekarang |
| Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al Gazali Makassar | Tahun 1990-sekarang |
| Anggota Wali Amanat IPB Bogor | Tahun 2002-2006 |
| Dewan Penyantun Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Ketua Umum Antar Agama Sulsel | Tahun 2004-sekarang |

Pengalaman Pekerjaan :

a. Pemerintahan

| | |
|--|-----------------|
| Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI | Tahun 1999-2000 |
| Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI | Tahun 2001-2004 |

b. Legislatif

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anggota DPRD Sulawesi Selatan | Tahun 1965-1968 |
| Anggota MPR RI Utusan Golkar | Tahun 1982-1987 |
| Anggota MPR RI Utusan Golkar | Tahun 1987-1992 |
| Anggota MPR RI Utusan Daerah | Tahun 1992-1997 |
| Anggota MPR RI Utusan Daerah | Tahun 1997-1999 |

c. Golkar

| | |
|---|---------------------|
| Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan | Tahun 1965-1968 |
| Anggota Dewan Penasihat DPD Golkar Sulsel | Tahun 1978-1999 |
| Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar Sulsel | Tahun 1999-2004 |
| Ketua Umum DPP Partai Golkar | Tahun 2004-sekarang |

d. Dunia Usaha

| | |
|--|-----------------|
| Direktur Utama CV. Hadji Kalla | Tahun 1966-2001 |
| Direktur Utama PT. Bumi Karsa | Tahun 1969-2001 |
| Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama | Tahun 1988-2001 |
| Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama | Tahun 1988-2001 |
| Direktur Utama PT. Kalla Inti Surya | Tahun 1993-2001 |
| Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International | Tahun 1995-2001 |

Penghargaan :

| | |
|---|------------|
| Doktor Honoris Causa dari Universitas Malaya | Tahun 2007 |
| Doktor Honoris Causa dari Universitas Soka, Jepang | Tahun 2009 |
| Menerima Tanda Kehormatan "Commander Del' Odre de Leopold" dari Kerajaan Belgia | Tahun 2009 |

B. CALON WAKIL PRESIDEN

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama Lengkap | : H. Wiranto, S.IP., SH |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 4 April 1947 |
| Agama | : Islam |
| Status Pernikahan | : Menikah |
| Istri | : Hj. Uga Usaman, SH., M.Si |
| Anak | : Tiga orang |



- a. Pendidikan Formal
1. SD Tahun 1959
 2. SMP Tahun 1962
 3. SMA Tahun 1965
 4. Akademi Militer Nasional Tahun 1968
 5. Universitas Terbuka (Fak. Ilmu Sosial & Politik) Tahun 1995
 6. Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer Tahun 1996
- b. Kursus/Pelatihan
1. Sussarpara Tahun 1968
 2. Sussarcab Infantri Tahun 1969
 3. Susjursar Tahun 1972
 4. Suslapa Infantri Tahun 1976
 5. Suspabinlatsat Tahun 1984
 6. Seskoad Tahun 1984
 7. Lemhanas Tahun 1995
- c. Pengalaman Jabatan
1. Dan To 1/C Yonif 713 DAM XIII TMT 01-11-69
 2. Wadan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-71
 3. Kasi – 1 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-72
 4. Dan Kima Yonif 713 DAM XIII TMT 01-01-73
 5. Kasi – 4 Yonif 713 DAM XIII TMT 01-04-75
 6. Kasi – 2 Brigif L- 18 Kostrad TMT 01-03-78
 7. Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 14-04-80
 8. Dan Yonif – 713 DAM XIII/MDK TMT 01-07-82
 9. Karotiknik Dirbang Pusif TMT 01-07-83
 10. Kadep Wilnik Pusif TMT 01-05-84
 11. Kas Brigif – 9 Kostrad TMT 01-05-85
 12. Waasops Kas Kostrad TMT 01-08-87
 13. Asops Kasidivis – 2Kostad TMT 15-08-88
 14. Ajudan Presiden RI TMT 01-10-89
 15. Kas Dam Jaya TMT 25-03-93
 16. Pangdam Jaya TMT 01-11-94
 17. Pangkostrad TMT 01-03-96
 18. Kasad TMT 07-06-97
 19. Pangab TMT 11-02-98
 20. Menhankam/Pangab TMT 16-03-98
 21. Menkopolkam TMT 29-10-990
 22. Ketua Dewan Eksekutif IDE Indonesia 2000- Sekarang
 23. Ketua Umum DPP Partai Hanura 2006- Sekarang
- d. Tanda Jasa/Penghargaan
1. BT. Mahaputra Adipradana
 2. BT. Dharma
 3. BT. Yudha Dharma Utama
 4. BT. Kartika Eka Paksi Utama
 5. BT. Jalasenasa Utama
 6. BT. Swa Buana Paksa Utama
 7. BT. Bhayangkara Utama
 8. BT. Yudha Dharma Nararya

9. BT. Kartika Eka Paksi Pratama
10. BT. Veteran Timur Tengah
11. BT. Kehormatan dari Spanyol
12. BT. Kehormatan dari Australia
13. BT. Kehormatan dari Belanda
14. BT. Pingat Jasa Gemilang dari Singapura
15. BT. Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) dari Brunai Darussalam
16. BT. Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) dari Pemerintah Malaysia
17. BT. Kesetiaan XXIV Tahun
18. BT. Penegak g-30-S/PKI
19. BT. Seroja
20. BT. Wirakarya
21. BT. Dwija Sistha
22. Manggala/Wirakarya Kencana

Visi dan Misi Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto 2009-2014

Visi

Indonesia yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat

Misi

- Tercapainya Ekonomi Bangsa yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.
- Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Demokratis Dengan Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat.
- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Budaya dan Otonomi Daerah yang Sehat, Efisien dan Efektif untuk Lebih Memantapkan Integrasi Nasional yang Lebih Menjamin Kebhinekaan.
- Mewujudkan Bangsa yang Aman, Tenteram dan Damai Dengan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mewujudkan Indonesia yang Dihormati dan Disegani oleh Bangsa-Bangsa Lain Dalam Bidang Ekonomi dan Politik.

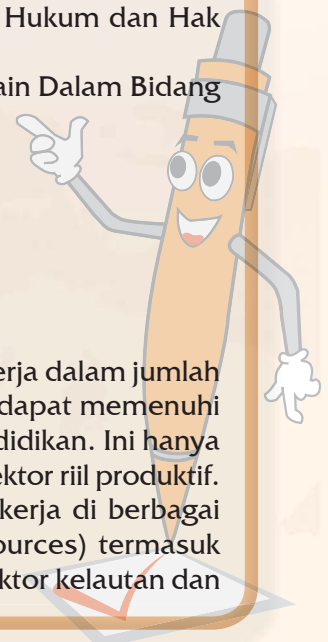
AGENDA KEBIJAKAN

I. BIDANG EKONOMI

1. Membangun Ekonomi Kerakyatan

Menyiapkan kebijakan dan program yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan memadai bagi seluruh warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ini hanya dapat terwujud, dengan menggalakkan berbagai kegiatan investasi dan usaha di sektor riil produktif.

Secara faktual sebagian besar rakyat Indonesia (70%) hingga saat ini, bekerja di berbagai sektor ekonomi berbasis SDA (sumber daya alam) terbarukan (renewable resources) termasuk sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; sektor kelautan dan



perikanan (perikanan, budidaya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, pulau-pulau kecil, dan non conventional ocean resources); dan sektor kehutanan (hutan alam, hutan tanaman industri, dan agroforestry), maka seharusnya kita secara all out dan sistematis membangun sektor ekonomi sebagai soko guru perekonomian bangsa.

2. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi

Elemen pokok kesejahteraan rakyat adalah pangan dan energi. Program kemandirian pangan harus diarahkan pada dua tujuan pokok, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dan tercukupinya kebutuhan pangan nasional. Sama halnya dengan pangan, energi adalah kebutuhan pokok. Ketersediannya adalah sesuatu yang esensial untuk menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, pembangunan energi harus diorientasikan pada optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui (seperti panas bumi dan energi nabati) guna mencukupi kebutuhan energi nasional.

3. Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri

Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk-produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing akan meningkat apabila kita mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional dan peningkatan nilai tambah hanya bisa dihasilkan apabila terdapat industri pengolahan. Dengan dasar ini, maka membangkitkan kembali industri pengolahan adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Namun, kebangkitan industri pengolahan tidak boleh sekadar menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah rendah, melainkan harus diberi penguatan baru yang dapat meninggikan nilai tambahnya. Hanya dengan cara ini, produk nasional mempunyai daya saing, berkelanjutan, dan dapat berkompetisi pada level internasional.

4. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah perjuangan yang tidak bisa ditawar. Seluruh kekuatan nasional harus memberi perhatian terhadap kebangkitan Koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha yang bergerak dalam dunia koperasi dan UMKM harus diberi stimulus untuk meningkatkan skala usahanya, keterampilan manajemennya, dan memperdalam kandungan teknologi atau inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pemerintah harus memberi jaminan iklim usaha yang kondusif, mendorong munculnya kemitraan antar-pelaku di dalam UMKM serta memperkuat kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan. Tak lupa, dukungan lembaga keuangan harus pula memadai.

5. Menjalankan Reformasi Agraria untuk Kesejahteraan Petani

Reformasi pertanian harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Reformasi tersebut diorientasikan untuk menjadikan pertanian tetap sebagai sektor usaha yang atraktif, menguntungkan, dan menghasilkan komoditi yang dapat mencukupi kebutuhan nasional. Prasyarat penting untuk mencapai tujuan ini adalah adanya reformasi agraria. Reformasi agraria dimaksudkan agar ada jaminan ketersediaan lahan produktif pertanian, jaminan bahwa aset-aset lahan yang dimiliki petani Indonesia tidak mudah dialihfungsikan, dan garansi bahwa aset lahan petani dapat ditransformasikan menjadi modal dan kekuatan bagi pengembangan usaha pertanian. Dengan dasar ini, maka aset-aset lahan petani Indonesia dapat lebih mudah dioptimalkan pemanfaatannya dan didorong produktivitasnya.

6. Anggaran untuk Rakyat

APBN ke depan akan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan hidup, dan pengutamaan kepentingan mayoritas yang lebih besar dibandingkan kepentingan segelintir orang. Sementara itu, untuk anggaran rutin harus semakin efisien. Untuk itu, alokasi dan distribusi anggaran harus mengutamakan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, memberi stimulus terhadap sektro riil, serta penyediaan infrastruktur publik yang layak

dan memadai. Agenda lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola utang secara bertanggung jawab. Rasio utang terhadap PDB harus semakin diturunkan. Sementara itu, pemanfaatan utang harus dilakukan secara lebih optimal. Utang luar negeri yang terikat dengan program-program yang kaku dan dipaksakan, sudah seharusnya semakin dikurangi.

7. Lembaga Keuangan dan Perbankan yang Mendorong Sektor Riil dan Memihak Rakyat.

Problem penting lembaga keuangan dan perbankan selama ini adalah tingginya risiko kredit sehingga fungsi intermediasinya menjadi rendah. Kredit yang mampu disalurkan ke sektor riil pun sangat jauh berkurang dibandingkan kemampuan portofolionya. Padahal, tanpa adanya dukungan lembaga keuangan dan perbankan yang memadai, dunia usaha tidak mungkin mampu bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus segera mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perbankan harus didorong untuk secepatnya melakukan konsolidasi sebagaimana skema Arsitektur Perbankan Indonesia dengan penekanan pada kecukupan modal dan pengelolaan risiko. Kelembagaan BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya juga harus didorong guna menopang UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

8. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok. Semakin maju ekonomi suatu negara, kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin berkembang. Begitu juga sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan mengalami hambatan yang serius. Atas dasar ini, pemerintah harus mempercepat program pembangunan infrastruktur yang selama masa krisis tidak banyak mengalami kemajuan.

Infrastruktur yang mutlak mendapat prioritas adalah pembangunan jalan tol untuk di daerah-daerah yang sudah berkembang, pembukaan jalan-jalan baru di daerah yang potensial, serta membuka daerah-daerah yang selama ini terisolir. Jalan trans Kalimantan dan Papua, umpamanya, adalah kebutuhan yang tidak mungkin lagi ditunda. Bersamaan dengan pembangunan jalan, perluasan jaringan kereta api juga sudah sangat mendesak. Jaringan kereta api di Sumatera dan Kalimantan, misalnya, adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi di daerah ini yang sekarang sedang mengalami perkembangan pesat. Infrastruktur lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan pelabuhan dan dermaga-dermaga beserta infrastruktur yang mendukungnya.

9. Pembangunan Kelautan

Indonesia adalah negara kepulauan sehingga pengembangan industri maritim masih perlu dipacu. Pengembangan industri maritim harus dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan industri transportasi laut, pengembangan budidaya hasil laut, pengembangan efisiensi industri penangkapan ikan, hingga industri pengolahan hasil-hasil kelautan beserta industri yang terkait lainnya. Di samping itu, perlu pula dibenahi sistem distribusi dan tata niaga komoditas kelautan. Target penting dari pengembangan industri kelautan ini peningkatan produksi hasil-hasil kelautan sehingga mampu menyamai negara-negara maritim lainnya.

10. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global serta Lingkungan Hidup.

Masalah pokok dalam perubahan iklim dan pemanasan global serta lingkungan hidup adalah bagaimana menurunkan jumlah emisi Gas Rumah Kaca. Hal ini dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi penanaman hutan kembali daerah-daerah yang sudah gundul, mempertahankan hutan lindung/taman nasional yang ada sebagai dasar dari kemampuan alami hutan dalam menyerap CO², penataan TPA, dan usaha konservasi hutan tropis di Indonesia.

Masalah pokok dalam lingkungan hidup adalah menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dengan upaya melestarikannya. Di sinilah perlunya pemerintah melaksanakan perannya secara adil dan merata sehingga memberi manfaat pada

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Sektor penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah hutan. Upaya konservasi serta rehabilitasi hutan masih perlu ditingkatkan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan teknologi, keterampilan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali atas perizinan pengusahaan hutan sehingga Indonesia tetap menjadi salah satu paru-paru dunia.

II. BIDANG POLITIK DAN HUKUM

1. Memperkuat Sistem Presidensial yang Didukung Sistem Kepartaian yang Sederhana

Agenda penting dalam demokratisasi ke depan adalah memperkuat sistem presidensial. Sistem ini akan kokoh apabila didukung oleh sistem kepartaian yang sederhana dan sistem pemilu yang efisien. Penyederhanaan partai dapat dilakukan dengan memperketat ambang batas partai yang boleh masuk di parlemen. Kalau sekarang ini hanya 2,5 persen, maka ambang batas untuk periode ke depan harus dinaikkan. Di samping itu, persyaratan pendirian partai baru harus diperketat. Pemilu yang bertingkat-tingkat sudah sangat mendesak untuk didesain ulang agar lebih sederhana dan tidak memboroskan energi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menyeragamkan waktu pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Legislatif.

2. Menata Kembali Fungsi Lembaga-lembaga Negara

Sistem perwakilan yang berlaku sekarang ini menganut sistem tiga kamar, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Namun desain fungsi dan perannya hanya memberi tekanan kepada DPR untuk menjalankan fungsi budget, legislasi, dan pengawasan. MPR yang dianggap lembaga tertinggi negara hanya mempunyai fungsi yang sangat terbatas. Sementara itu, DPD tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali memberi usul dan masukan kepada DPR. Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara didorong untuk melakukan penataan ulang agar peran dan fungsinya berimbang dan proporsional.

Di bidang eksekutif, jumlah departemen dan kementerian masih terlalu banyak dan fungsinya bersifat tumpang tindih. Kondisi ini menyulitkan koordinasi dan bahkan menjadi sumber inefisiensi. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menyederhanakan jumlah departemen dan kementerian agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi.

3. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggara Negara yang Tangkas, Tanggap, dan Cepat.

Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan akselerasinya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, cepat, dan adil dalam pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat front office pelayanan publik yang terukur. Di samping itu, penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) di dalam birokrasi harus ditata ulang. Di sisi lain, KKN harus tetap diberantas.

4. Membangun Politik secara Bermartabat

Moral dan etika politik harus ditegakkan dengan cara bermartabat, sehingga tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak untuk kepentingan politik masing-masing, dalam pelaksanaan berbagai proses pemilihan. Kepada semua kekuatan reformasi prodemokrasi, semua orsospol, para pemimpin gerakan reformasi, LSM, dan komponen pembangunan lainnya diajak untuk bersama-sama memelihara komitmen yakni komitmen reformasi untuk menciptakan masyarakat madani yang demokratis dan bermartabat; dan bukan sebaliknya: buyar, surut, dan berantakan di tengah jalan, karena terdesak dan dikalahkan oleh serentak hadirnya persaingan visi, persaingan kepentingan, persaingan memasuki periode Pilpres.

5. Pendidikan Politik Kader Bangsa

Praktik sistem multi-partai, seringkali terjadi bahwa kepentingan bangsa dikalahkan oleh kepentingan partai. Kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Di sinilah perlunya dikembangkan terus pendidikan politik kader bangsa, bukan pendidikan politik golongan, kelompok, atau partai, dilandasi semangat kebersamaan dan keterbukaan yang merangsang terjadinya dialog dan perdebatan yang sehat. Tujuannya yang ingin dicapai adalah merangsang putra-putra terbaik bangsa yang ingin terjun dalam politik untuk menjadi figur-figur nasional atau calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berkomitmen tinggi, mandiri, dan visioner.

6. Jati Diri Bangsa dan Tantangan Global

Nasionalisme modern meniscayakan kemampuan setiap bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyatnya bersama-sama dengan bangsa lain. Diperlukan good governance, yaitu pemerintahan yang kompeten, bersih dari KKN, efektif, dan efisien, serta berkomitmen penuh untuk memulihkan harkat dan martabat seluruh rakyat. Dengan format tersebut, bangsa Indonesia akan tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, di tengah arus perubahan global, Indonesia perlu pemimpin-pemimpin yang tegas, visioner, dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan serta mampu mengimplementasikan visi bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 45, ideologi Negara Pancasila, NKRI, dan Kebhinnekaan.

7. Mengefektifkan Hubungan Pusat dan Daerah

Bupati dan Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat telah mendorong kuatnya posisi dan peran kepala daerah. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan legitimasi yang kuat dari pemerintahan daerah sehingga memungkinkan untuk melakukan percepatan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, situasi itu kerap kali mengganggu efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat perlu ditingkatkan fungsinya sebagai koordinator dan pengawas dalam semua program-program pembangunan. Untuk itu, revisi UU pemerintahan daerah merupakan keharusan untuk mempertegas fungsi dan peran pemerintah daerah serta menjaga efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah.

8. Meningkatkan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kancah Internasional

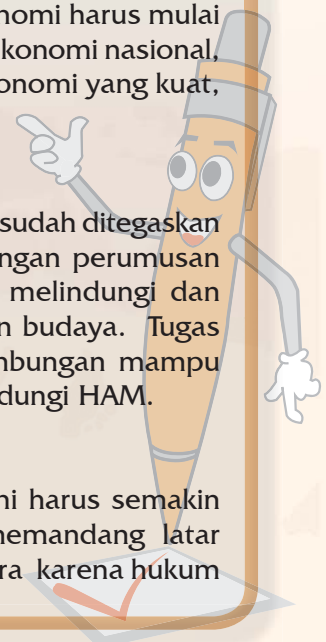
Indonesia harus proaktif dalam berbagai forum internasional. Peran Indonesia harus terus dimantapkan dalam berbagai forum internasional. Misalnya dalam ASEAN, Gerakan Non Blok, APEC, OKI, PBB dan forum internasional lainnya. Di samping itu, diplomasi ekonomi harus mulai mendapatkan perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan agenda-agenda ekonomi nasional, misalnya pengembangan ekspor, sangat membutuhkan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, supaya kepentingan nasional mendapat dukungan dunia internasional.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kendatipun asas-asas penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan, perlindungan HAM tidak selesai dengan perumusan perundangan. Hal penting lainnya adalah bagaimana pemerintah menjaga melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tugas ini dapat dilaksanakan secara optimal apabila pemerintah secara berkesinambungan mampu membangun etos aparatur negara yang sadar terhadap tugasnya untuk melindungi HAM.

10. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi konstitusi. Ketentuan ini harus semakin dimantapkan agar penegakan hukum dapat berlangsung lebih adil dan tidak memandang latar belakang seseorang. Penegakan hukum harus berlaku untuk semua warga negara karena hukum



berlaku untuk semua. Untuk mewujudkan hal ini, institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, harus didorong proaktif dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Lembaga penegakan hukum harus menjadi contoh terdepan dari aparat yang bersih dan bekerja secara profesional.

11. Menciptakan Kepastian Hukum melalui Peraturan Perundangan

Kepastian hukum adalah kebutuhan yang sangat esensial bagi pengaturan kehidupan politik ekonom dan sosial budaya. Tanpa adanya kepastian hukum, interaksi sosial menjadi terhambat dan dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai agenda menciptakan kepastian hukum dengan mendesain sistem peraturan perundangan yang koheren, antisipatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum demikian dapat diwujudkan apabila pemerintah bersungguh-sungguh membenahi peraturan perundangan yang compang-camping. Politik hukum tidak boleh sekadar normatif dan legalis, imun dari dinamika masyarakat. Politik hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional kenegaraan dan kebangsaan.

12. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bagian lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah elemen penting bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, niscaya hukum menjadi mandul dan tidak bermakna. Atas dasar ini, maka agenda yang perlu diteruskan adalah menggalakkan sosialisasi kesadaran hukum. Target utamanya adalah menciptakan masyarakat sadar hukum sehingga mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

III. BIDANG HANKAM

1. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

Harus disadari bahwa ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara telah berkembang jauh, seperti infiltrasi melalui teknologi informasi, sengketa perbatasan, maraknya illegal logging and fishing, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya. Untuk itu, TNI harus terus didorong untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah memperkuat pengamanan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Kehadiran TNI dalam wilayah-wilayah tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarannya, untuk mencegah penyelundupan atau penyerobotan batas negara.

2. Mengikis Tindak Kejahatan, Meningkatkan Keamanan, Ketertiban serta Ketentraman.

Polri sebagai garda depan penjagaan keamanan negara perlu terus ditingkatkan perannya dalam mengikis tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran ini perlu terus digalakkan mengingat jenis kejahatan telah berkembang luas. Tidak hanya kejahatan konvensional yang menjadi gangguan, melainkan kejahatan kekayaan negara, kejahatan transnasional, hingga berbagai peristiwa yang menimbulkan efek kontijensi. Bahkan belakangan ini, tindak pidana terorisme menjadi ancaman yang sangat potensial. Luasnya ragam gangguan keamanan tersebut menyebabkan Polri dituntut terus-menerus meningkatkan peran profesionalnya.

3. Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) TNI Polri.

Alutsista TNI dan Polri yang sudah tua, harus dimodernisasi. Hal ini mendesak dilakukan agar pertahanan Indonesia semakin kokoh dan kemampuan Polri dalam menangani persoalan keamanan semakin tinggi. Modernisasi alutsista TNI harus dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan industri pertahanan di dalam negeri. BUMN yang bergerak dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan dapat menjadi garda depan modernisasi alutsista. Di samping

itu, modernisasi alutsista dapat pula menggandeng berbagai potensi industri dalam negeri lainnya, misalnya PAL untuk perkapalan atau IPTN untuk kedirgantaraan. Strategi memanfaatkan industri di dalam negeri ini perlu terus digalakkan demi mengurangi ketergantungan pada alutsista impor.

4. Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Keamanan

Saat ini anggaran pertahanan jauh dari mencukupi kebutuhan ideal pertahanan NKRI. Sementara itu, kesejahteraan prajurit TNI jauh tertinggal dibandingkan aparatur negara lainnya. Padahal, tugas yang diemban harus mempertaruhkan nyawa. Masalah ini perlu segera dibenahi dan membutuhkan gebrakan tersendiri. Pemerintah harus segera melakukan terobosan di tengah keterbatasan APBN, untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Di samping cara konvensional dengan menambah alokasi anggaran untuk TNI, pemerintah dapat pula melakukan terobosan-terobosan lain tanpa harus menyalahi peraturan perundangan.

IV. BIDANG PENDIDIKAN

1. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Evaluasi yang Proporsional

Problem krusial dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan. Daerah perkotaan umumnya mempunyai kualitas pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertinggal. Masalah ini sudah banyak diupayakan selama pemerintahan sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan. Daerah-daerah yang mempunyai kualitas pendidikan rendah diberi perangsang lebih banyak untuk segera mengejar ketertinggalannya. Di samping itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar-daerah dan sistem evaluasi pendidikan harus dilakukan secara proporsional. Menyamakan sistem evaluasi pendidikan di kota besar dengan daerah tertinggal jelas menunjukkan ketidakadilannya. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya memberi akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar berprestasi di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

2. Meningkatkan Penyediaan Pendidikan yang Terjangkau melalui Anggaran yang Memadai

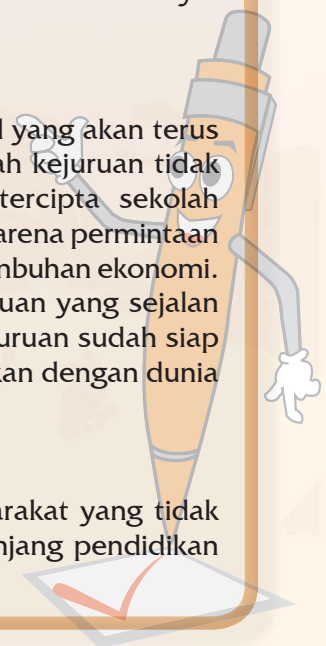
Sesuai dengan amanah konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan dasar. Konstitusi juga menggariskan budget yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran negara. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar sembilan tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan terjangkau.

3. Mempertegas Pendidikan Kejuruan melalui Diversifikasi Keahlian

Untuk mengantisipasi permintaan tenaga kerja terampil dan semi terampil yang akan terus meningkat, pemerintah mendorong lahirnya sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan tidak boleh menumpuk pada bidang tertentu saja, melainkan harus didorong agar tercipta sekolah kejuruan yang mempunyai diversifikasi yang luas. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena permintaan tenaga kerja semakin lama akan semakin spesifik seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemerintah harus pula menyiapkan kurikulum sekolah kejuruan yang sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Ini semua dimaksudkan agar lulusan sekolah kejuruan sudah siap bekerja. Untuk mewujudkan hal ini, maka konsep link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja harus diwujudkan.

4. Peningkatan Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat

Perlu ditingkatkan pemberian program-program Beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu di berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai ke jenjang pendidikan



tinggi. Juga peningkatan pemberian Beasiswa kepada guru dan dosen yang berprestasi.

V. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Meningkatkan Solidaritas Sosial, Kesetiakawanan, dan Memupuk Semangat Nasionalisme

Solidaritas sosial dan kesetiakawanan adalah esensi penting dari kehidupan kebangsaan Indonesia. Pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong lahirnya kehidupan multikultur yang lebih baik, yang ditandai oleh penghormatan atas keberagaman dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan komitmen bersama sebagai satu bangsa. Tujuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari kehidupan kecil dalam rukun tetangga, kelompok-kelompok sosial hingga yang cakupannya luas, yaitu kehidupan kebangsaan nasional. Untuk mewujudkan hal ini, maka revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan komitmen kebangsaan mutlak terus-menerus digalakkan dengan pendekatan baru yang lebih humanis dan tidak doktriner.

2. Pemberdayaan bagi Kalangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Sesuai amanah konstitusi masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus segera diberdayakan, dengan memberikan bimbingan, bantuan, hingga santunan. Akses kalangan miskin terhadap fasilitas dasar dan publik harus dibuka lebar-lebar dan tanpa sama sekali membebani mereka, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan pelatihan, permodalan, akses pasar yang memadai serta bantuan-bantuan lainnya, agar kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat hidup secara layak, mandiri, dan meningkat kemampuan ekonominya.

3. Pengembangan Modal Budaya dan Modal Sosial

Modal budaya dan modal sosial sebagai sumberdaya yang mampu ditransformasikan menjadi nilai tambah. Wujud nyata modal budaya adalah kearifan lokal (local wisdom and local genius) yang direvitalisasikan dan diadaptasikan dengan nilai modernitas sehingga menjadi ikatan dan konsensus yang kuat untuk menumbuhkan kebersamaan dan kreativitas yang mampu mendorong terbentuknya peradaban. Modal sosial dapat berujud dalam bentuk tindakan-tindakan kesetiakawanan, kerjasama (kooperasi), dan gotong royong di berbagai bidang kehidupan. Dengan kelangkaan sumberdaya ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia, maka mengembangkan modal sosial adalah suatu langkah strategis mengingat modal sosial tersebut dapat berperan sebagai complementary maupun substitute dari modal ekonomi.

4. Mengembangkan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kesenian yang beradab

Budaya yang dikembangkan harus berorientasi pada pengembangan inovasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu didorong budaya baca dan budaya menulis guna membangun masyarakat pembaca (reading society), masyarakat belajar (learning society), dan masyarakat yang kritis (critical society), sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif dan produktif. Pengembangan kesenian, sebagai salah satu bentuk ekspresi dari kreativitas, perlu didorong untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. Pengembangan Iptek dan kesenian tetap harus diletakkan didalam kerangka perjuangan meningkatkan harkat martabat dan peradaban manusia.